

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat yang menjadi salah satu penilaian dari keberhasilan kinerja pemerintah. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti: makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendefinisikan miskin adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau layak bagi kehidupannya. Kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks dalam suatu negara karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dengan demikian kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan baik kemampuan dalam kepemilikan faktor produksi maupun manfaat dari hasil proses pembangunan. Selain itu pembangunan yang direncanakan pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi sehingga manfaat pembangunan yang tidak menjangkau mereka. Oleh karena itu kemiskinan

disebabkan karena sifat alamiah/cultural, yaitu masalah yang muncul di masyarakat berkaitan dengan kepemilikan faktor produksi, produktifitas dan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri. Selain itu kemiskinan disebabkan oleh masalah struktural yaitu miskinnya strategi dan kebijakan nasional yang dilaksanakan.

Sharap, et.al dalam kuncoro (2003 :131) mengidentifikasi ada 3 penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu:

1. Secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatannya yang timpang atau tidak merata.
2. Kemiskinan timbul akibat dari perbedaan sumber daya manusia.
3. kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal ketika penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*)

Tingkat rendah atau tingginya kemiskinan di suatu daerah tergantung pada dua faktor yakni, tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempit kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Jelas, bahwa setinggi apa pun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatan yang tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah (Todaro , 2000).

Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan

penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus diatasi paling tidak dikurangi.(Hakim, 2002)

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 22 Kabupaten dan 1 Kota atau 23 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sebanyak 5.371.519.00 jiwa pada tahun 2018. Banyaknya jumlah Kabupaten/Kota dan jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat memberikan gambaran pembangunan manusia yang bervariasi dengan adanya penduduk miskin. Untuk lebih lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Presentase Tingkat Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur Menurut
Kabupaten/kota Periode 2013-2017 (Persen)

No	Wilayah	Persentase Penduduk Miskin				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sumba Barat	29.35	27.79	30.56	29.34	29.28
2	Sumba Timur	30.08	27.63	31.74	31.43	31.03
3	Kupang	19.96	19.05	23.37	23.43	22.91
4	Timor Tengah Selatan	27.3	26.79	31.12	29.89	29.44
5	Timor Tengah Utara	21.37	20.89	25.2	24.07	23.52
6	Belu	14.42	14.24	16.81	15.82	15.95
7	Alor	19.88	19.48	22.92	22.35	21.67
8	Lembata	24.56	22.32	27.13	26.26	26.48
9	Flores Timur	9.06	7.83	9.66	10.31	10.75
10	Sikka	12.72	12.27	14.28	14.33	14.2
11	Ende	20.53	20.37	23.49	23.89	23.95
12	Ngada	11.25	10.76	12.81	12.69	12.77
13	Manggarai	21.33	20.22	23.18	22.5	21.91
14	Rote Ndao	28.86	26.85	30.49	29.6	28.81
15	Manggarai Barat	18.74	17.2	20.12	19.35	18.86
16	Sumba Tengah	31.82	31.4	36.22	36.55	36.01
17	Sumba Barat Daya	27.47	25.78	30.01	30.63	30.13
18	Nagekeo	12.08	12.02	14.38	13.61	13.48
19	Manggarai Timur	24.38	24.01	28.64	27.71	26.8

20	Sabu Raijua	32.37	29.48	33.17	32.44	31.07
21	Malaka	-	-	17.28	16.66	16.52
22	Kota Kupang	9.33	8.7	10.21	9.97	9.81
23	Nusa Tenggara Timur	20.41	19.6	22.61	22.19	21.85

Sumber :Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018

Berdasarkan Tabel diatas Presentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur selama 5 tahun terakhir Rata rata mengalami Fluktuasi baik daerah kota maupun daerah Kabupaten. Presentase penduduk miskin Paling banyak pada periode 2013 yaitu pada Kabupaten Sabu Raijua yakni sebesar 32,37%, dan Presentase terendah ada pada Kota Kupang dengan angka 9,33%. Pada Tahun berikutnya yaitu 2014 Presentase Penduduk Miskin tertinggi berada pada Kabupaten Sumba Tengah dengan angka 31,40% dan Presentase Penduduk Miskin terendah ada pada Kota Kupang yang menurun dari tahun sebelumnya menjadi 8,70%. Pada tahun 2015 sampai 2017 Presentase Penduduk Miskin Tertinggi ada pada Kabupaten Sumba Tengah dengan angka berturut turut 36,22%, 36,55%, dan 36,01%, dengan angka Presentase Penduduk Miskin Terendah pada Kota Kupang dengan angka berturut turut 10,21%, 9,33 % dan 9,8%.

Dari gambaran di atas, terlihat bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan yang besar dan belum ditemukan solusi optimal yang bisa menyelesaikan masalah ini.

Di samping dihadapkan pada angka kemiskinan yang cukup tinggi, Nusa Tenggara Timur juga menghadapi masalah lain yang sangat serius, yaitu masih rendahnya kualitas SDM yang tercermin dari IPM atau dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh *United Nations Development*

Programme (UNDP). IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purcashing power parity index* (PPP). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2013-2017 (persen)

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sumbah Barat	60.55	60.90	61.36	61.85	62.30
2	Sumbah Timur	61.44	62.04	62.54	63.22	64.19
3	Kupang	61.07	61.68	62.04	62.39	62.79
4	Timor Tengah Selatan	58.76	59.41	59.90	60.37	61.08
5	Timor Tengah Utara	59.56	60.41	60.96	61.54	62.03
6	Belu	59.12	59.72	60.54	61.04	61.44
7	Alor	57.52	58	58.5	58.99	59.61
8	Lembata	60.56	61.45	62.16	62.81	63.09
9	Flores Timur	59.80	60.42	61.24	61.9	62.89
10	Sikka	60.84	61.36	61.81	62.42	63.08
11	Ende	64.64	65.25	65.54	65.74	66.11
12	Ngada	64.43	64.64	65.1	65.61	66.47
13	Manggarai	59.49	60.08	60.87	61.67	62.24
14	Rote Ndao	57.28	57.82	58.32	59.28	60.51
15	Manggarai Barat	59.02	59.64	60.04	60.63	61.65
16	Sumbah Tengah	59.26	59.9	57.91	58.52	59.39
17	Sumbah Barat Daya	57.25	57.6	60.53	61.31	61.46
18	Nagekeo	62.24	62.71	63.33	63.93	64.74
19	Manggarai Timur	55.74	56.58	56.83	57.5	58.51
20	Sabu Raijua	51.55	52.51	53.28	54.16	55.22
21	Malaka	56.14	56.94	57.51	58.29	58.9
22	Kota Kupang	77.24	77.58	77.95	78.14	78.25
23	Nusa Tenggara Timur	61.68	62.26	62.67	63.13	63.73

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017

Pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 61,68 persen dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2017 mencapai angka 63,73 persen. Jika dilihat berdasarkan pencapaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama kurun waktu 2013-2017 ini menggambarkan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan namun angkanya masih relative lebih rendah dibandingkan angka IPM Nasional. Menurut BPS (2017) UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkan tiga klasifikasi yakni: *Low* (IPM kurang dari 50), *Lower-Medium* (IPM antara 50 dan 65,99), *Upper-Medium* (IPM antara 66 dan 79,99) dan *High* (IPM 80 ke atas). Berdasarkan klasifikasi dari UNDP tersebut, nilai IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode tahun 2013-2017 masih termasuk kategori menengah- *Medium* (IPM antara 50 dan 65,99).

Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diupayakan melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar untuk membentuk modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain merupakan investasi dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat, dimana pertumbuhan produktivitas tersebut merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pada hakekatnya

seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi maka akan terhindar dari kemiskinan. (Mulyadi, 2003) .

Menurut Regnar Nurkse dalam (Faisal, 2013) teori lingkaran setan kemiskinan menjelaskan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin, karena produktivitas rendah, yang mengakibatkan penghasilan penduduk rendah, dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minimum sehingga tidak dapat menabung dimana tabungan merupakan sumber pembentukan modal masyarakat. Sedangkan menurut teori perangkap kemiskinan yang dikemukakan oleh Maltus menjelaskan bahwa suatu saat pertumbuhan penduduk akan melebihi persediaan bahan makanan yang ada. Ketika keadaan ini terjadi, maka akan mengakibatkan jumlah bahan makanan menjadi terbatas. Penduduk yang berpendapatan rendah yang tidak mendapatkan bahan makanan akan menjadi miskin.

Tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan (Suryawati, 2005).

Pendidikan dalam penelitian ini dilihat dari rata-rata lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah dimanfaatkan untuk melihat kualitas penduduk berdasarkan pendidikan formal yang diselesaikan. Semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang.

Aspek aspek yang perlu di perhatikan yaitu sistem pendidikan yang seringkali menggambarkan berbagai hal yang esensial dari suatu masyarakat. Dimana struktur sosial dan ekonomi suatu masyarakat ternyata sangat tidak merata, maka sistem pendidikan akan dapat mencerminkan keadaan tersebut dalam bentuk terbatasnya jumlah orang yang bisa menikmati jenjang pendidikan tinggi. Dalam waktu yang bersamaan, bidang pendidikan dapat pula mempengaruhi bentuk dan arah perkembangan suatu masyarakat di masa mendatang lewat berbagai jalan. (Todaro, 2000)

Pendidikan formal yang menonjolkan pentingnya perluasan pendidikan yang memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup, terutama kalangan penduduk miskin, menciptakan lapangan kerja yang luas dan memberi kesempatan yang sama bagi semua yang meraih kemajuan. Ilmu ekonomi menyatakan bahwa pendidikan sangatlah penting walaupun belum mempunyai wujud yang pasti hal ini mutlak mempercepat perbaikan ekonomi, menuntaskan kemiskinan melalui kesempatan kerja dengan taraf penghasilan yang menjanjikan sehingga dapat menutup garis kemiskinan. (Todaro, 2000).

Berikut ini dapat dilihat bagaimana pemerintah berupaya meningkatkan Pembangunan untuk sektor pendidikan demi terciptanya pendidikan yang baik dan layak sehingga lahir manusia yang berintelektual dengan demikian akan meminimalkan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Presentase Tingkat Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-
2017 (Persen)

No	Wilayah	Rata-rata Lamanya Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sumba Barat	6.37	6.38	6.44	6.45	6.51
2	Sumba Timur	5.98	6.14	6.31	6.48	6.73
3	Kupang	6.71	6.84	6.88	6.93	7.1
4	Timor Tengah Selatan	5.94	5.98	6.26	6.27	6.39
5	Timor Tengah Utara	6.22	6.69	6.87	7.13	7.14
6	Belu	6.95	7.03	7.05	7.06	7.07
7	Alor	7.68	7.74	7.75	7.76	7.77
8	Lembata	7.07	7.44	7.51	7.52	7.58
9	Flores Timur	6.74	6.86	6.98	6.99	7.12
10	Sikka	6.49	6.53	6.54	6.55	6.56
11	Ende	7.03	7.3	7.37	7.38	7.63
12	Ngada	7.47	7.51	7.6	7.61	7.85
13	Manggarai	6.76	6.79	6.81	6.97	6.98
14	Rote Ndao	6.11	6.16	6.45	6.67	6.98
15	Manggarai Barat	6.65	6.8	6.81	6.82	7.14
16	Sumba Tengah	5.07	5.1	5.12	5.21	5.51
17	Sumba Barat Daya	5.97	6.01	6.29	6.3	6.31
18	Nagekeo	6.98	7.14	7.33	7.34	7.52
19	Manggarai Timur	6.04	6.42	6.43	6.44	6.45
20	Sabu Raijua	5.24	5.54	5.56	5.68	6.02
21	Malaka	5.64	6.07	6.08	6.31	6.32
22	Kota Kupang	11.35	11.41	11.43	11.44	11.45
23	Nusa Tenggara Timur	6.76	6.85	6.93	7.02	7.15

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan Tabel diatas Dari tahun 2013 – 2017 selalu terjadi peningkatan Angka Presentase Tingkat Pendidikan baik di Kota maupun di Kabupaten, dimana angka presentase paling tinggi ada pada Kota Kupang dengan angka 11,35% pada tahun 2013 dan meningkat hingga tahun 2017 mencapai angka 11,45%, sedangkan angka presentase paling kecil ada pada Kabupaten

Sumba Tengah dengan Angka 5,07 pada tahun 2013 dan meningkat tiap Tahun hingga tahun 2017 mencapai 5,51%.

Selain Pendidikan, Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah Hak bagi setiap penduduk yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan layanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang sejahtera. Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan dengan kemiskinan.

(Todaro, 2000).

Berikut ini disajikan tabel Tingkat Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melihat bagaimana Perkembangan Pada sektor kesehatan ini dapat berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Presentase Tingkat Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017 (Persen)

No	Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sumba Barat	66.07	66.11	66.11	66.15	66.2
2	Sumba Timur	63.45	63.48	63.88	64	64.12
3	Kupang	62.87	62.97	63.17	63.33	63.49
4	Timor Tengah Selatan	65.42	65.45	65.55	65.6	65.65
5	Timor Tengah Utara	65.89	65.89	66.09	66.14	66.19
6	Belu	62.26	62.31	63.01	63.21	63.42
7	Alor	59.71	59.73	60.23	60.35	60.47
8	Lembata	65.3	65.35	65.85	66.02	66.19

9	Flores Timur	63.88	63.88	64.28	64.36	64.45
10	Sikka	65.68	65.7	66.1	66.2	66.3
11	Ende	64.24	64.27	64.37	64.42	64.48
12	Ngada	67.3	67.32	67.32	67.34	67.36
13	Manggarai	64.75	64.78	65.48	65.66	65.84
14	Rote Ndao	62.67	62.86	62.86	63.13	63.41
15	Manggarai Barat	65.92	65.98	65.98	66.19	66.19
16	Sumba Tengah	67.05	67.65	67.65	67.73	67.74
17	Sumba Barat Daya	67.61	67.08	67.08	67.71	67.76
18	Nagekeo	66.04	66.05	66.25	66.31	66.36
19	Manggarai Timur	67.26	67.27	67.27	67.39	67.4
20	Sabu Raijua	57.83	57.98	58.38	58.69	59
21	Malaka	64.11	64.15	64.15	64.27	64.29
22	Kota Kupang	68.09	68.14	68.34	68.46	68.58
23	Nusa Tenggara Timur	65.82	65.91	65.96	66.04	66.07

Sumber BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur , 2018

Berdasarkan Tabel diatas Dari tahun 2013 – 2017 selalu terjadi peningkatan Presentase tingkat kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sama halnya dengan sektor pendidikan terjadi peningkatan yang signifikan baik di Kabupaten dan Kota pada tiap tahunnya dimana kota kupang dengan angka presentase paling tinggi yaitu 68,09% pada tahun 2013 dan meningkat hingga tahun 2017 menjadi 68,58% dan angka terendah ada pada Kabupaten Sabu Raijua denga angka 57,83% dan meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 59,00% pada tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi penulis membatasi permasalahan yang diteliti, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat Pengaruh Tingkat

Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode 2013-2017. Berikut ini adalah masalah yang penulis rumuskan yang akan coba dipecahkan untuk mendapatkan jawaban :

1. Seberapa besar pengaruh Tingkat pendidikan secara parsial dan simultan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi NTT 2013-2017 ?
2. Seberapa besar pengaruh Tingkat kesehatan secara parsial dan simultan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi NTT 2013-2017 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan awal penelitian. adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi NTT 2013-2017.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi NTT 2013-2017.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai suatu kesempatan bagi penulis menambah wawasan ilmiah yang berkaitan dengan program studi yang sedang penulis tekuni khususnya mengenai Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan 2013-2017.

2. Sebagai bahan studi atau tambahan literatur serta informasi bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemerintah Nusa Tenggara Timur khususnya, yaitu memberikan laporan seberapa besar pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2017.